

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

Aditya Susmono Tyas Wisanggeni

wisanggeniaditya@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The objective of this study was to determine the implementation of President Regulation Number 54 Year 2010 and its amendments in the process of goods and services procurement in the 2015 Election of Sigi Regent and Vice Regent at General Elections Commission of Sigi Regency. The goods and services procurement in the 2015 Election of Sigi Regent and Vice Regent mentioned in this study was the procurement of goods and services that were considered to be the supports for the 2015 Election of Sigi Regent and Vice Regent. The analysis of this study used the theory of George C. Edward III (1980) in Widodo (2010) comprising the 4 aspects influencing the policy implementation effectiveness, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used in this study was qualitative research method, that is the research method used in research of natural object condition in which researcher is the key instrument; the data collection technique was done in triangulation way, the data analysis was inductive, and the study results was qualitative emphasizing the meaning more than generalization. The results of this study showed that the implementation of President Regulation Number 54 Year 2010 and its amendment in the process of goods and services procurement in the 2015 Election of Sigi Regent and Vice Regent had not done effectively because the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the process were still having weaknesses.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Goods and Services Procurement*

Keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak hanya diukur dari keberhasilannya melahirkan pemimpin yang *legitimated*, melainkan juga harus diukur dari tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemilu berbeda dengan pengadaan barang dan jasa secara umum. Setidaknya terdapat 6 (enam) potensi masalah dalam pengadaan barang dan jasa pemilu dalam konteks Pilkada Serentak. *Pertama*, pengadaan barang dan jasa pilkada serentak harus mempedomani waktu pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. *Kedua*, adanya disparitas harga yang berbeda-beda di daerah meskipun barang yang ditenderkan sama (spesifikasinya). Ini akan menjadi potensi masalah dan rentan temuan

korupsi jika perbedaan anggarannya cukup mencolok sementara barangnya sama. (sindonews.com, 13 Mei 2015). *Ketiga*, ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak tahun 2015. (IHPSI BPK, 2015:63). *Keempat*, karakteristik barang dan jasa pemilu berbeda dengan barang dan jasa pada umumnya. Barang dan jasa pemilu merupakan produk kebijakan politik, sehingga jenis, standar, spesifikasi dan kebutuhannya bisa berubah setiap saat sesuai dengan arah dan dinamika politik. *Kelima*, pengadaan barang dan jasa pemilu rentan dikriminalisasi oleh pihak-pihak yang tidak puas dalam penyelenggaraan pemilu. *Keenam*, jika kita mencermati anggaran pemilu, maka hampir sebagian besar

dana pemilu itu dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. Ini mengindikasikan bahwa pengadaan barang/jasa pemilu sangat vital, karenanya harus dikelola dengan baik dan cermat.

Sampai dengan saat ini, aturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemilu belum dapat diwujudkan dalam aturan tersendiri, sehingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemilu mengacu pada kebijakan pengadaan barang/jasa yang ada dan masih berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sigi Tahun 2015 pada KPU Kabupaten Sigi olehnya menjadi hal yang sangat penting dan vital. Namun, keberhasilan (efektifitas) implementasi kebijakan tersebut sangat tergantung pada beberapa aspek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori George C. Edward III (1980) dalam Widodo (2010) yang mengatakan ada 4 (empat) aspek kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yakni aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi/sikap pelaksana dan aspek struktur birokrasi.

Aspek komunikasi, Edward III dalam Widodo (2010:97) mengatakan bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada

pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini aspek komunikasi dimaknai sebagai pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

Aspek sumberdaya, Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dalam hal sumberdaya manusia, Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Selanjutnya, Edward III menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”.

Mengenai sumberdaya kewenangan, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya sendiri. Selanjutnya sumberdaya fasilitas, Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya fasilitas (peralatan) merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini memaknai aspek sumberdaya manusia sebagai ketersediaan personil yang memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan, sumberdaya kewenangan dimaknai sebagai pemahaman semua pihak terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dan sumberdaya fasilitas dimaknai

sebagai ketersediaan fasilitas yang dapat dipergunakan oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Aspek disposisi/sikap pelaksana seperti yang dimaksud George C. Edward III (1980) bahwa disposisi/sikap pelaksana adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini, aspek disposisi/sikap pelaksana dimaknai sebagai sikap konsisten pelaksana kebijakan terhadap proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan ketentuan kebijakan.

Aspek struktur birokrasi, Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), “*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Selanjutnya, Edward III dalam Winarno (2005:155) juga menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan

koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa “struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini, aspek struktur birokrasi akan dimaknai sebagai pelaksanaan SOP dan koordinasi antar struktur birokrasi pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi pada KPU Kabupaten Sigi. Peneliti melihat pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan PPK dalam proses pengadaan barang dan jasa belum optimal, PPK hanya melaksanakan tugas sebagai penandatangan kuitansi/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan menyetujui bukti pembelian (menandatangani kontrak).

Selain itu, terdapat keterbatasan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya rangkap jabatan KPA dan PPK. Dalam hal kewenangan, masih terjadi intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa yakni dalam penentuan calon penyedia jasa konsultan hukum melalui rapat pleno komisioner yang memutuskan calon penyedia yang akan ditunjuk. Keikutsertaan komisioner dalam survey-survey harga keperluan logistik pilkada ke pihak calon rekanan dan masih adanya anggapan dari sebagian kepala sub bagian (kasubbag) KPU Kabupaten Sigi bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam bidangnya merupakan kewenangannya. Selanjutnya, tidak tersedianya fasilitas jaringan internet pada kantor KPU Kabupaten Sigi juga menjadi kendala tersendiri karena menyebabkan kesulitan dalam melakukan akses informasi barang dan jasa pilkada yang harus selalu *update* sesuai dengan petunjuk dari KPU RI.

Selanjutnya, peneliti juga melihat masih terdapat sikap inkonsisten PPK dengan masih terjadinya pembiaran terhadap praktek-praktek intervensi yang ada oleh PPK.

Terakhir, terlihat bahwa prosedur standar operasi (SOP) yang ada sering terkendala oleh waktu, karena dibatasi oleh tahapan-tahapan Pemilihan. Koordinasi antar pelaksana kebijakan seperti PPK, Pejabat Pengadaan. ULP dan PPHP sudah cukup baik, namun masih dipengaruhi adanya intervensi dari komisioner KPU Kabupaten Sigi.

Berbagai permasalahan di atas, memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 belum optimal. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pada KPU Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) dalam Widodo (2010) yang mengatakan ada 4 (empat) aspek kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yakni aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi/sikap pelaksana dan aspek struktur birokrasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya dalam proses pengadaan barang dan jasa pada KPU Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. (Sugiyono, 2012:1)

Lokasi penelitian ini pada kantor KPU Kabupaten Sigi. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari program pascasarjana program studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Tadulako Palu.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Berkaitan dengan hal tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah para pelaksana pengadaan pada KPU Kabupaten Sigi yang terdiri dari: Ketua KPU Kabupaten Sigi selaku Pengguna Anggaran (PA) dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, Sekretaris KPU Kabupaten Sigi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, 1 orang Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sigi, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) KPU Kabupaten Sigi, Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Sigi selaku tim penyusun perencanaan anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai informan kunci (*key informant*).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data terukur yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan

penelitian untuk mengungkap implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pada KPU Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer dan Data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara (*interview*) dan Dokumentasi. Dalam Penelitian ini peneliti adalah instrument dari penelitian itu sendiri, yang didukung pedoman wawancara mendalam (*interview guide*). Data dalam penelitian ini di analisis menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, (1994:10-12), yaitu meliputi: Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian data, dan Menarik kesimpulan (*Verivikasi*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang dan Tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu

Berdasarkan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 68 ayat (4), menyebutkan bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pengadaan barang dan jasa pada KPU Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 merupakan wewenang dan tanggung jawab sekretariat KPU Kabupaten Sigi.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015

Pengadaan barang dan jasa pada KPU Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa pendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, meliputi pengadaan semua barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai berikut:

1. PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan. PKPU ini menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan
2. PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagai regulasi pengadaan barang dan jasa pendukung pemutakhiran data dan daftar pemilih.
3. PKPU No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat sebagi regulasi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi,
4. PKPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, merupakan regulasi bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa perlengkapan pemungutan suara, seperti Surat Suara, Kotak Suara, Bilik Suara, Formulir, Sampul, Hologram, Segel, Daftar Pasangan Calon, Template

Tunanetra, Alat Kelengkapan TPS, dan Tinta Sidik Jari.

5. PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye menjadi regulasi bagi pengadaan barang dan jasa keperluan Kampanye, seperti pengadaan Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye serta pengadaan jasa penayangan iklan di media massa.
6. PKPU No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menjadi regulasi dalam pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan proses audit dana kampanye peserta Pemilihan.
7. PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan merupakan regulasi bagi pengadaan formulir pencalonan dan pengadaan jasa konsultasi dalam bidang hukum yakni advokat atau pengacara untuk membantu dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara maupun Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).
8. PKPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan regulasi untuk pengadaan Formulir C yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
9. PKPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan merupakan regulasi untuk pengadaan Formulir D, yang digunakan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan.

Aspek Komunikasi

Dalam penelitian ini aspek komunikasi didasarkan pada pemahaman pelaksana pengadaan barang dan jasa terhadap tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), secara umum KPA telah melaksanakan tugas dan

kewenangannya sesuai dengan ketentuan seperti menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dalam website LPSE Kabupaten Sigi, menetapkan Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), mengawasi pelaksanaan anggaran dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa. Hanya satu tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPA yakni menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat, hal ini disebabkan karena KPA juga berkedudukan sebagai PPK.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas PPK tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan rangkap jabatan KPA dan PPK. Sebagian tugas PPK dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan seperti membuat spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri, membuat rancangan kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak terutama yang melalui metode Pengadaan Langsung, menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA, melaporkan kemajuan pekerjaan kepada KPA dan menyimpan serta menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sehingga, PPK hanya melaksanakan tugas sebagai penandatanganan kuitansi/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan menyetujui bukti pembelian (menandatangani kontrak). Kondisi tersebut juga diperkuat oleh tanggapan yang dikemukakan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Sigi bahwa pejabat pengadaan lebih banyak melakukan komunikasi dengan penyedia barang dalam pelaksanaan pekerjaan padahal seharusnya pejabat pengadaan bekerja dalam soal pemilihan penyedia saja. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, PPK mempunyai peran yang sangat strategis. Tugas dan wewenang PPK berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan

ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya. (Yeri Adriyanto, Widyaiswara Muda BDK Semarang, 2015). Oleh karena itu, KPA yang bertindak sebagai PPK perlu memahami dengan benar tugas pokok dan kewenangan PPK. Ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan PPK tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh KPA yang bertindak sebagai PPK, karena KPA tidak memahami tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPK yang melekat padanya.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sigi secara umum Pokja ULP telah memahami tugas pokok dan kewenangannya, tantangan yang dihadapi adalah harus lebih selektif dalam memilih penyedia yang mampu menyediakan barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Tahapan Pemilihan. Kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya ULP adalah kendala teknis yang ada pada perangkat LPSE Kabupaten Sigi yakni jebolnya server LPSE Kabupaten Sigi karena terlalu seringnya pemadaman listrik.

Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) KPU Kabupaten Sigi secara umum telah melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan. Adapun beberapa masalah yang sempat dihadapi adalah pengiriman barang yang masih terdapat kekurangan dalam hal jumlahnya, bukan ketidaksesuaian dalam hal spesifikasi. Kendala teknis yang lain adalah penghitungan untuk barang yang berjumlah banyak maka PPHP perlu meminta bantuan dari pihak lain untuk membantu melakukan penghitungan. Terakhir, kendala yang dihadapi dalam penerimaan hasil pekerjaan jasa adalah

penerimaan pengadaan jasa penyiaran iklan di radio. Hal ini disebabkan karena pembuktiannya harus dilakukan dengan memantau penyiaran iklan tersebut sesuai dengan waktu-waktu penayangan yang telah disepakati dalam kontrak.

Aspek Sumberdaya

Yang dimaksud sebagai aspek sumberdaya manusia adalah ketersediaan personil yang mampu melaksanakan kebijakan. Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan ditandai dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan kebijakan.

Dirunut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, KPUD mendapatkan dana dari Hibah Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya. Belanja hibah pemilu kepada KPUD didasari oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Secara garis besar Ketua KPUD adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran di KPUD karena pasal 10 Permendagri ini tegas menyatakan bahwa Ketua KPUD adalah penandatanganan perjanjian hibah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Pengguna Anggaran (PA) pada pasal 1 ayat 12. PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Hal ini diadopsi oleh Pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian Ketua KPUD ketika mendapatkan dana hibah untuk dikelola, sedang menjalankan tugas sebagai PA dalam ruang lingkup belanja hibah yang dipertanggungjawabkannya. Dengan demikian kedudukan Ketua KPU Kabupaten Sigi sebagai PA dalam pengelolaan dana hibah

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi telah sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yang anggaran dananya berasal dari APBD, maka menurut Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015, yang selanjutnya dilaksanakan dalam aturan yang lebih teknis melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, maka berdasarkan Point 2 (a) Surat Edaran tersebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan ini maka Sekretaris KPU Kabupaten Sigi adalah KPA dalam pengelolaan dana hibah langsung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, dengan demikian maka kedudukan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi selaku KPA telah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi, selaku KPA, dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, Sekretaris KPU Kabupaten Sigi selaku KPA bertindak juga sebagai PPK, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan personil pada KPU Kabupaten Sigi yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Rangkap jabatan KPA yang bertindak juga sebagai PPK memang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (2b), namun memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang selaku PPK.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Sigi, penetapan Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja ULP pada KPU Kabupaten Sigi telah memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Karena keterbatasan personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa, maka kelompok kerja ULP berasal dari pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Selanjutnya, Sekretaris KPU Kabupaten Sigi selaku KPA telah menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) KPU Kabupaten Sigi melalui Surat Keputusan Nomor 09 L/Kpts/SET/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. .

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPA/PPK, ternyata tidak semua pihak memahami Organisasi Pengadaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya campur tangan dari pihak lain yakni Komisioner KPU Kabupaten Sigi dalam proses pemilihan penyedia. Peran mereka terhadap proses pengadaan barang/jasa seharusnya hanya berfungsi sebagai pengawas dan pengambil kebijakan tentang jenis, standar, spesifikasi dan jumlah kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan. Hal tersebut senada dengan pandangan dari Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara Komisioner dan Sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Komisioner itu menyusun kebijakan dan pengadaan barang dan jasa merupakan wewenang dan tanggung jawab sekretariat KPU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Sigi, campur tangan atau intervensi Komisioner KPU Kabupaten Sigi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 adalah pada penentuan penyedia jasa untuk jasa konsultan hukum. Intervensi terhadap proses penentuan penyedia barang/jasa akan mengakibatkan konflik kepentingan yang akan mengganggu jalannya tugas-tugas teknis yang akan

dilaksanakan penyedia jasa seperti mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Selain komisioner KPU yang belum memahami kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa, ternyata sebagian Kepala Sub Bagian (Kasubbag) di KPU Kabupaten Sigi juga masih ada yang belum memahami kewenangan itu. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi, hal tersebut terjadi karena adanya kebiasaan pengelolaan keuangan/anggaran di Pemerintah Daerah yang sangat mempengaruhi anggapan bahwa segala proses pengelolaan keuangan/anggaran yang terdapat pada sub bidang atau sub bagiannya menjadi tanggungjawabnya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya, mengenai fasilitas, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi, selaku KPA, KPU Kabupaten Sigi belum memiliki jaringan internet. Hal tersebut senada dengan tanggapan dari Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa kendala fasilitas yang lain adalah gudang yang belum memadai untuk menyimpan barang-barang logistic pemilu.

Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, banyaknya temuan (korupsi, mark up, pengaturan pemenang tender, dsb) yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa lebih diakibatkan karena faktor integritas daripada keterbatasan pengetahuan mengenai aturan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Salah satu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan adalah adanya intervensi. Di sinilah integritas dipertaruhkan, kredibilitas dan independensi dipertandingkan. Integritas, kredibilitas bahkan independensi seseorang seringkali goyah akibat adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Intervensi dalam pengertian campur tangan yang berlebihan dalam urusan dan tugas pengelolaan pengadaan.

Berdasarkan wawancara dengan KPA/PPK menunjukkan bahwa KPA/PPK KPU Kabupaten Sigi belum dapat memenuhi persyaratan integritas sebagaimana mestinya karena masih mengakomodasi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya dalam hal pemilihan penyedia. Hal ini ditunjukkan pada saat proses pemilihan penyedia khususnya pada pengadaan yang menggunakan metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, di mana prosesnya sangat rentan dengan intervensi dan kepentingan dari pihak komisioner KPU Kabupaten Sigi, KPA yang juga merangkap sebagai PPK mengakomodasi intervensi tersebut dengan mengambil jalan tengah yaitu menerima calon-calon penyedia dari pihak komisioner bahkan membiarkan terjadinya campur tangan komisioner dalam menentukan penyedia jasa konsultan hukum. Namun di sisi lain, pada saat terjadi pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia PPK memblack list penyedia tersebut untuk tidak ditunjuk kembali dalam kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya. Perbedaan disposisi/sikap KPA/PPK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya masih terjadi inkonsistensi terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPA/PPK, SOP yang ada sering tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena terdapat keterbatasan pemahaman pelaksana pengadaan terhadap SOP. Disamping itu, pengadaan barang/jasa Pemilu dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan, sehingga pelaksanaannya dibatasi oleh waktu, sedangkan pelaksanaan SOP menuntut waktu yang relative lama.

Dalam hal fragmentasi, berdasarkan hasil penelitian, hubungan komunikasi dan

koordinasi antar unit dalam Organisasi pengadaan barang/jasa pada KPU Kabupaten Sigi secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, ada satu potensi yang dapat merusak hubungan komunikasi dan koordinasi tersebut yakni adanya intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa akibat kurangnya pemahaman komisioner dan kasubbag KPU Kabupaten Sigi terhadap kewenangan Organisasi Pengadaan, disamping juga kondisi keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa di KPU Kabupaten Sigi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam proses pengadaan barang dan jasa pada KPU Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan analisis hasil penelitian menggunakan teori Edward III (1980) dalam Widodo (2010), maka diketahui bahwa aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi/sikap pelaksana dan aspek struktur birokrasi masih memiliki kelemahan-kelemahan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pada aspek komunikasi, perlu ditingkatkan pemahaman terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya pada para pelaksana pengadaan.
2. Pada aspek sumberdaya, perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), perlu ditambah personil-personil yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengadaan barang/jasa melalui pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa dan perlu dilakukan

penambahan fasilitas yakni ketersediaan jaringan internet dan gudang logistic yang memadai pada kantor KPU Kabupaten Sigi.

3. Pada aspek disposisi/sikap pelaksana, perlu ada ketegasan sikap dan konsistensi dari para pelaksana pengadaan barang/jasa terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga apabila ada intervensi dari pihak lain, maka hal tersebut dapat dihindari;
4. Pada aspek struktur birokrasi, perlu ditingkatkan pemahaman pelaksana pengadaan terhadap Standar Operational Procedure (SOP) pengadaan barang/jasa dan memperkuat komunikasi dan koordinasi setiap struktur birokrasi Organisasi Pengadaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini, khususnya kepada yang terhormat Dr. H. Irwan Waris, M.Si, ketua tim pembimbing, Dr. Hj. Ani Susanti, M.Si anggota tim pembimbing, yang telah membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*, Jakarta.
- George Edwards III. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly, Inc; Washington; 1980.
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Sindonews.com, 13 Mei 2015.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Surat Edaran KPU RI Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media, Malang.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing, Malang.

- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yeri Adriyanto, Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Widyaiswara Muda BDK Semarang, 2015.